

▶ BPJS KESEHATAN

12 Juta Peserta Menunggak Iuran

JAKARTA — Sebanyak 12 juta peserta program jaminan kesehatan nasional—kartu Indonesia sehat atau JKN—KIS menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Reni Lestari
redaksi@bisnis.com

Hal tersebut diungkapkan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Hanya saja, pihaknya enggan mengemukakan nilai total tunggakan iuran dari 12 juta peserta tersebut.

“(Sebanyak) 12 juta yang menunggak iuran tersebar ke dalam beberapa kelompok, dan terbesar di kelompok pekerja bukan penerima upah,” kata Andayani saat Rapat Dengar Pendapat tentang Kepesertaan JKN antara BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR, Selasa (10/4).

Sebagai catatan, sampai dengan 1 April 2018, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 195,1 juta jiwa.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan peserta menunggak iuran, bergantung pada kelasnya.

Bayu menjelaskan, peserta kelas III yang menunggak iuran, kemungkinan besar dikarenakan tidak mampu membayar. Lebih lanjut, seharusnya peserta kelas III yang tidak mampu bayar, dimasukkan dalam penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah daerah.

“Kenapa pemerintah daerah, karena itu amanat UU No. 36/2009 tentang kesehatan. [Alokasi] anggaran kesehatan di APBN itu 5%, sedangkan di APBD itu 10%,” ujarnya.

Budi pun mendorong agar pemerintah turun tangan da-

lam menangani hal ini. Hal itu disebabkan program JKN masuk program strategis nasional yang wajib didukung oleh setiap daerah.

“Ada UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, [menyatakan] kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional, bisa terkena sanksi,” katanya.

Namun demikian, baik Bayu maupun Handayani enggan menyebutkan nominal tunggakan iuran yang berkontribusi pada defisit BPJS Kesehatan 2017. Sementara itu, diketahui defisit BPJS Kesehatan pada tahun lalu menyentuh angka Rp9 triliun.

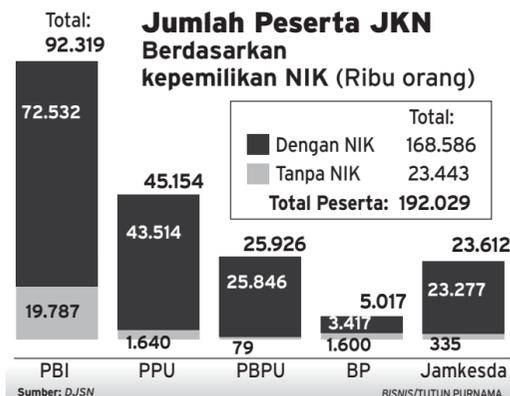
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menggarisbawahi risiko tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Hal itu mengacu pada target pemerintah untuk mencapai universal health coverage (UHC) pada 2019, yang berarti sebanyak 257 juta penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta program JKN-KIS.

“Risiko terbesar adalah orang harus membayar satu keluarga, akhirnya banyak tunggakan.”

Lebih lanjut, Dede menyebutkan, selain tunggakan iuran peserta JKN-KIS, pihaknya juga menyorot adanya kepesertaan ganda PBI yang dibayar oleh pemerintah.

“Kami menemukan, yang dibiayai negara melalui anggaran yang ditetapkan Komisi IX, banyak yang ganda. Peserta PBI banyak yang memiliki kartu bisa sampai dua-tiga kartu.”

Mengenai kepesertaan PBI ganda tersebut, Andayani Budi Lestari menjelaskan, pada saat kartu diserahkan, memang be-



lum ada alat yang mendeteksi apakah yang bersangkutan sudah menjadi peserta atau belum. Dia melanjutkan, mulai 2016 lalu seluruh peserta yang mendaftar wajib memiliki NIK.

“Dengan Kemensos kami juga telah melakukan kerjasama, ada mirroring. Kalau Kemensos akan menetapkan yang bersangkutan menjadi PBI, maka akan bisa melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ada dalam kategori miskin,” jelas Andayani.

SIMPANG SIUR DATA

Selain itu, Komisi IX juga menyorot adanya simpang siur data antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan. Data yang dimaksud yakni yang digunakan sebagai dasar penetapan PBI yang dibiayai oleh APBN.

Dede Yusuf menekankan koordinasi antar lembaga, terutama mengenai data faktual yang menjadi dasar pemerintah mengucurkan dana alokasi untuk bantuan iuran.

“Rasanya perlu ada duduk bersama antara pelaku-pelaku data Kementerian Sosial, Dirjen Dukcapil, BKKBN, lalu diintegrasikan sehingga nanti bisa ditentukan berapa uang yang kita turunkan untuk peserta

miskin,” jelasnya.

Tenaga Ahli Kedepuitan II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto menggarisbawahi pengelolaan data kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Kemensos dan Pemerintah Daerah selama ini melakukan pemutakhiran status kependudukan dua kali dalam 1 tahun, tetapi status kemiskinan belum menjadi fokus.

“Yang menjadi fokus hanya masalah pemutakhiran data kependudukan. Pemutakhiran status kemiskinan harusnya di-update secara reguler juga.”

Dia menjelaskan, dalam praktiknya, proses pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh Kemensos untuk kepentingan bantuan sosial menemui kendala di lapangan. Beberapa pemerintah daerah, lanjut Bimo, mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi yang digunakan Kemensos.

Adapun untuk mengurai permasalahan kepesertaan PBI ganda, Bimo sepakat untuk semua pihak yang berkepentingan duduk bersama dan membedah data yang dinilai tidak sinkron. ■

▶ PEMBERDAYAAN DISABILITAS INDONESIA



JIBI/M. Ferri Setiawan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto (kanan), berbincang dengan perwakilan penerima bantuan sepeda motor modifikasi untuk disabilitas saat penyerahan secara simbolis dalam acara Pemberdayaan Disabilitas Indonesia Bersama BPJS Ketenagakerjaan di Graha Saba Buana, Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (10/4). Bantuan pelatihan, bantuan alat gerak disabilitas, dan bantuan alat penunjang usaha diberikan kepada 535 penyandang disabilitas di Tanah Air.

▶ ENTITAS DIDUGA ILEGAL

Satgas Ingatkan Masyarakat Hati-Hati

JAKARTA — Penawaran investasi ilegal dinilai semakin mengkhawatirkan karena para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar. Padahal, kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin.

Kemarin, Selasa (10/4), Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) menetapkan 18 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha dan berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas yang terbentuk dari gabungan 13 lembaga dan kementerian ini pun meminta masyarakat berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 18 entitas tersebut.

Dari 18 entitas itu, sembilan di antaranya bergerak di bidang multi level marketing atau MLM, enam lainnya di bidang *cryptocurrency*, satu terkait investasi uang, satu di investasi saham dan satu lainnya menjadi pialang berjangka tanpa izin.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha 18 entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing.

Lebih lanjut, dia meminta agar masyarakat waspada dan tidak mengikuti penawaran atau produk dari 18 entitas itu. Dengan demikian sepanjang 2018, Satgas sudah mengimbau masyarakat

untuk berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 74 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Satgas Waspada Investasi juga meminta masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.”

DAPAT IZIN

Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa www.gkinvest.co.id dan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri telah mendapatkan perizinan.

Pada 7 Maret 2018, satgas yang terbentuk dari gabungan 13 lembaga dan kementerian ini menetapkan keduanya bersama 55 entitas lain yang diduga melakukan kegiatan usaha dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa terdapat dua entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu www.gkinvest.co.id dan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri.”

Dia menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri telah memperoleh izin persetujuan pembukaan cabang dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di 5 kabupaten/kota, yaitu Denpasar, Serdang Bedagai, Samsir, Bengkalis, dan Asahan.

Sementara itu, www.gkinvest.co.id diidentifikasi sebagai entitas yang menjalankan layanan jasa investasi di bidang *futures trading*. (Oktaviano D.B. Hana)

▶ SOSIALISASI LAPORAN BERKALA



Bisnis/Dedi Gunawan

Deputi Direktur Bidang Pengawasan Jasa Penunjang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan Supriyono (kiri), berbincang dengan Ketua Departemen Organisasi dan Sosial Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia

(Apparindo) Amanda Stanley di sela-sela acara sosialisasi SEOJK No. 3/SEOJK-05/2018 di Jakarta, Selasa (10/4). Sosialisasi tersebut membahas tentang bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi

▶ VOLUME PENJAMINAN

Lini Properti Bakal Tumbuh Pesat

JAKARTA — Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia optimistis volume penjaminan dari lini properti dapat tumbuh dua kali lipat pada tahun ini.

Apalagi, belum lama ini perseroan menggandeng Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (REI) untuk menjamin pembiayaan bagi para pengembang perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Utama Jamkrindo Randi Anto menyampaikan, volume penjaminan properti mencapai Rp10,4 triliun pada 2017, atau 7% dari total volume penjaminan 2017 yang mencapai Rp148,6 triliun.

Dia meyakini kerja sama ini dapat membantu mengejar target volume penjaminan yang dipatok Rp170,9 triliun

pada 2018, atau naik 15% dari realisasi tahun lalu.

Melalui dukungan 56 kantor cabang dan 17 kantor unit pelayanan, sosialisasi program penjaminan pembiayaan bagi anggota REI ini dapat lebih masif ke daerah. “Seharusnya pertumbuhan properti bisa lebih cepat jika bersama dengan teman-teman di daerah,” katanya, belum lama ini.

Adapun, penjaminan yang ditawarkan mencakup penjaminan kredit modal kerja konstruksi, penjaminan kredit pemilihan rumah (KPR), penjaminan *supply chain financing* (SCF), penjaminan/kontrak bank garansi dan *surety bond*.

Randi Anto mengatakan, langkah pihaknya dalam menggandeng persatuan pengusaha properti menjadi solusi bagi pengembang yang berskala

usaha kecil menengah dan mikro yang masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber pembiayaan.

Dia juga berharap dapat menekan bunga pembiayaan konstruksi.

Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Amin Mas’udi menyampaikan, perseroan memasang target awal volume penjaminan dari sektor properti sebesar Rp14 triliun atau naik 40% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp10,4 triliun.

Dia optimistis melalui kerja sama ini, volume penjaminan properti dapat tumbuh dua kali lipat dari target awal atau mencapai Rp28 triliun sepanjang 2018.

Kontribusi non-KUR masih mendominasi total volume penjaminan. Sepanjang tahun lalu, Jamkrindo berhasil mencatat-

kan volume penjaminan untuk non-KUR sebesar Rp98,1 triliun dan KUR sebesar Rp50,47 triliun. “Kami targetkan properti Rp14 triliun. Dengan kerja sama ini bisa tumbuh *double*.”

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (DPP REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, pihaknya hendak membantu pengembangan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, khususnya bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi di daerah-daerah.

Menurut dia, selama ini pengembang yang membangun rumah bersubsidi dihadapkan pada kendala biaya kredit konstruksi yang tinggi. Hal ini dapat melemahkan pengembang berskala UMKM. (Azizah Nur Afli)

PT HARTADINATA ABADI Tbk
JEWELLERY MANUFACTURING

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARTADINATA ABADI Tbk**

Direksi PT Hartadinata Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Bandung dengan ini bermaksud untuk menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang sebelumnya telah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 dengan rincian perubahan-perubahan sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 03 Mei 2018
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan selama tahun buku 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tawaran dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
- Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2017.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya/orang yang ditunjuk) yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB, atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 dan dibuktikan dengan konfirmasi tertulis untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) atau fotocopy KTP atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku.
- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara mereka keluaran selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di alamat-alamat yang tercantum pada butir 5 di bawah ini.

Bahan-bahan untuk hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat di download di website Perseroan di www.hartadinata.com sejak tanggal kilan ini. Apabila diperlukan, bahan Rapat telah tersedia dan dapat dipelajari/diambil selama jam kerja dengan menyerahkan fotocopy SKS dan tanda pengenal lainnya, di alamat berikut:

PT. Hartadinata Abadi Tbk ; Jl. Kopo Sayati Nomor 165, Bandung 40228-Indonesia Tlp: 022-5402326

Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilan dimohon agar memperhatikan:

- Fotocopy Anggaran Dasar atas nama Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat, dan
- Bukti Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus Organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berkenaan termasuk tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendaftaran.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan lala terlambatnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 11 April 2018
PT. HARTADINATA ABADI, Tbk
Direksi